

## Membongkar Uang Haram Pemilukada DKI Jakarta 2012<sup>1</sup>

### Kondisi Terkini

Bergulirnya Pemilukada DKI Jakarta pada tahun 2012 harus mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Berbagai problem krusial sudah mulai mengemuka. Mulai dari penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang terlihat kurang siap dalam pelaksanaan, pembajakan APBD DKI, politisasi birokrasi, dana kampanye tidak transparan, serta maraknya kampanye hitam. Berbagai problem awal yang semula terlihat persoalan administrasi tersebut jika dibiarkan akan menjadi ancaman korupsi pemilukada DKI Jakarta saat ini.

Gejala korupsi Pemilukada DKI Jakarta sudah mulai terjadi. Dalam advokasi yang telah dilakukan ICW dan LBH Jakarta menemukan setidaknya empat gejala tersebut. *Pertama*, ada potensi penyalahgunaan anggaran publik untuk kepentingan kampanye. Disinyalir, alokasi Dana Hibah yang melonjak tajam dari tahun sebelumnya, 1,3 Triliun rupiah Pemerintah DKI Jakarta adalah “dana taktis” untuk pemenangan incumbent dalam Pemilukada ini.

### Alokasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial DKI Jakarta 2010-2012

Alokasi	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
Dana Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta.	433.653.000.000	882.574.016.819	1.367.244.871.416
Bantuan Sosial	46.691.101.559	58.269.400.000	31.190.000.000
Total	479.344.101.559	840.843.416.819	1.398.434.871.416

Sumber: APBD DKI Jakarta 2010-2012, Diolah

Penelitian ICW di Banten menemukan, strategi (modus) korupsi politik dalam alokasi dana hibah untuk pemenangan Pemilukada yaitu : 1) Lembaga Penerima Fiktif, 2) Lembaga Penerima Alamatnya Sama, 3) Aliran dana ke lembaga yang dipimpin keluarga dan kroni gubernur, 4) Dana Hibah Disunat, 5) Sebagian Besar Penerima Bantuan Sosial Tidak Jelas.

*Kedua*, ada dugaan upaya me-markdown Pendapatan Asli Daerah untuk modal pemenangan. Hal ini seperti yang terjadi di Jayapura yaitu dana retribusi parkir dan minuman keras untuk modal pemenangan Pemilukada. Hal ini cukup terlihat dalam penerimaan pendapatan daerah yang justru mengalami trend menurun menjelang pemilukada.

### Realisasi Pendapatan DKI Jakarta 2009-2011

Pendapatan Daerah	2011	2010	2009
Hasil Lelang Titik Reklame	39.035.438.399	48.764.115.188	48.995.247.109,00
Retribusi Jasa Usaha	52.118.343.821	70.716.952.587	65.811.165.762,00
Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah	114.442.987.399,5	156.686.949.102	127.003.025.405,00

Sumber : BPKD Provinsi DKI 2008-2011, Diolah

<sup>1</sup> Disiapkan oleh Tim IndonesiaCorruption Watch (ICW) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

*Ketiga*, dalam APBD DKI terdapat dana kampanye tersebut. Yaitu aktifitas-aktifitas gubernur DKI yang dialokasikan dalam anggaran. Tercatat sekitar Rp. 9.757.422.400 dana siluman untuk aktifitas memopulerkan gubernur DKI. (terlampir)

*Keempat*, sumber dana kampanye para calon tidak transparan dan rawan ditopang oleh pengusaha hitam (cukong). Beberapa calon belum menyampaikan total dana kampanye secara berkala dalam mengikuti proses Pemilukada DKI 2012.

Laterbelakang, Harta Kekayaan dan Sumber Pendanaan Kampanye Calon Gubernur DKI 2012.

Pasangan Calon Gubernur DKI 2012	Profil	Harta Kekayaan	Kemungkinan Sumber Pendanaan	Keterangan
DR. Ing. H. Fauzi Bowo dan Mayjen (Purn) H. Nachrowi Ramli, SE.	Gubernur DKI-Purnawirawan	Rp. 45.935.609.591 (LHKPN 2010)	Uang Pribadi Sumbangan (Badan Hukum, Pengusaha dan Politisi) Mendompeng APBD	Belum Publikasikan
Ir. H. Joko Widodo dan Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM	Walikota Surakarta-Anggota DPR	Rp. 14.192.270.500 (LHKPN 2008)	Uang Pribadi Jualan Baju Sumbangan (Badan Hukum, Pengusaha dan Politisi)	Pernah di Publikasikan Namun tidak berkala
DR. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA dan Prof. DR. Didik Junaedi Rachbini	Anggota DPR-Akademisi	-	Sumbangan (Badan Hukum, Pengusaha dan Politisi) Sumbangan Masyarakat	Belum Publikasikan
Faisal Batubara dan Biem Triani Benjamin	Akademisi-Pengusaha	-	Sumbangan (Badan Hukum, Pengusaha dan Politisi). Sumbangan Masyarakat	Pernah di Publikasikan Namun tidak berkala
Ir. H. Alex Noerdin, SH dan Letjen TNI (Marinir) Purn. H. Nono Sampono, S.Pi., M.Si.	Gubernur Sumatra Selatan-Purnawirawan	-	Sumbangan (Badan Hukum, Pengusaha dan Politisi). Uang Pribadi	Belum Publikasikan
Mayjend TNI(Purn) Drs. H. Hendarji Soepandji, S.H dan Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA	Purnawirawa-Pengusaha	-	Sumbangan (Badan Hukum, Pengusaha dan Politisi). Uang Pribadi	Belum Publikasikan

Catatan : LHKPN Ditelusuri dari KPK, Yang tidak tercatat kemungkinan pejabat belum melaporkan dan swasta.

*Kelima*, mulai muncul bentuk-bentuk politik uang. Politik uang bukan hanya saat H-1 atau serangan fajar, akan tetapi dalam Pemilukada DKI 2012 ini, sudah terjadi beberapa bentuk politik uang walaupun belum memasuki masa kampanye. Bentuk politik uang yang sudah ditemukan antara lain, bakti sosial gratis, sembako murah, pemberian uang kepada RT, RW dan aparat, pemberian insentif kepada tokoh masyarakat dan agama.

## Peran Penyelenggara

Beberapa indikasi korupsi politik yang sudah muncul dalam proses Pemilukada DKI tersebut dikarenakan KPU kurang cekatan dan tegas dalam menegakkan aturan. Padahal saat ini belum memasuki masa kampanye, dimana korupsi politik akan banyak terjadi saat masa kampanye hingga pemungutan suara. Dengan fakta yang ada sekarang dan potensi menjelang masa kampanye, namun belum ada sikap tegas dan terobosan dari KPU, tentunya ini sangat mengkhawatirkan untuk sukses tidaknya Pemilukada DKI 2012 ini.

### Catatan Tahap Pelaksanaan Pemilukada dan Kebijakan KPU DKI

<b>Tahapan Pemilukada DKI 2012</b>	Problematika	Kebijakan KPU
Pemutakhiran Data Pemilih	Diduga terdapat 1,4 Juta DPT Fiktif.	KPU kurang tegas dan lambat dalam mengambil keputusan menyikapi dugaan tersebut.
Pencalonan	Verifikasi Calon	Kurang Transparan dalam proses verifikasi awal.
Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara.	Kurang Transparan	Di Website KPU tidak terdapat transparansi kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk Pemilukada DKI 2012.
Menjelang Masa Kampanye	Beberapa Calon Sudah melakukan kampanye terselubung dan pemasangan baliho yang tidakberaturan.	Sosialisasi Aturan kampanye belum masif. Sanksi pelanggaran kampanye pun belum di sosialisasikan dengan aktif.

Sumber : Diolah dari pemantauan pemberitaan media.

Sama seperti dengan KPU, peran Panwaslu juga cukup mencemaskan. Menjelang masa kampanye sudah terjadi beberapa pelanggaran dan kampanye hitam antar calon. Namun Panwaslu belum melakukan tindakan pencegahan dan pemberian sanksi terhadap calon-calon yang telah melakukan pelanggaran.

### Catatan Tahap Pelaksanaan Pemilukada dan Kebijakan Panwaslu DKI.

<b>Tahapan Pemilukada DKI 2012</b>	Problematika	Kebijakan Panwaslu
Pemutakhiran Data Pemilih	Diduga terdapat 1, 4 Juta DPT Fiktif.	Panwaslu tidak mempunyai data verifikasi untuk meluruskan atau mengoreksi DPT.
Pencalonan	Diduga adanya Candidacy Buying	Panwaslu tidak dapat menjangkau dengan kebijakan.
Menjelang Masa Kampanye	Beberapa Calon Sudah melakukan kampanye terselubung dan kampanye hitam dan pemasangan balihoserta iklan yang tidakberaturan serta mendahului masa kampanye.	Panwaslu tidak menindak calon yang melanggar dan memberi sanksi. Lebih cenderung fokus pada tahap sosialisasi saja.

Sumber : Diolah dari pemantauan pemberitaan media.

Dengan problem penyelenggaraan Pemilukada DKI tersebut muncul kekhawatiran publik yang mempertanyakan independensi KPU dan Panwaslu DKI. Disinyalir salah satu kunci kemenangan dalam pemilukada ada pada penyelenggara baik KPU maupun Panwas. Karena itu, semua pasangan berupaya mempengaruhi penyelenggara dari tingkat atas hingga paling bawah seperti PPS dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL). Caranya dengan menempatkan

orang-orang pasangan calon di kedua lembaga tersebut atau mempengaruhi mereka dengan politik uang atau iming-iming jabatan.

Berikut adalah indikasi penyelenggara tak lagi independen.

No	Modus
1	Membrief atau memfasilitasi pasangan calon tertentu untuk meminta dukungan anggota PPK
2	Makan bersama dan berkunjung ke rumah pasangan calon kepala daerah
3	Stiker sosialisasi menggiring pemilih memilih pasangan tertentu
5	Menghilangkan hak pilih pendukung pasangan tertentu
6	Meloloskan pemilih yang tidak terdapat di DPS dan DPT
7	Menambah suara pasangan tertentu
8	Tidak membersihkan media kampanye pasangan tertentu
9	Tidak menindaklanjuti laporan dari pasangan calon tertentu

Sumber : Hasil Penelitian ICW

### Rekomendasi

Berdasarkan fakta mulai munculnya korupsi politik dalam Pemiluakada 2012 ini maka kami ICW dan LBH menuntut :

1. Mempertanyakan dasar pengalokasian, transparansi dan akuntabilitas dana hibah Pemprov DKI Jakarta tahun 2012 senilai 1,3 Miliar kepada Gubernur DKI, Fauzi Bowo.
2. Menuntut agar distribusi dana hibah dan bantuan sosial DKI Jakarta tahun 2012 dihentikan (moratorium) selama masa tahapan Pemiluakada hingga berakhir.
3. Menuntut semua pasangan calon menyampaikan daftar sumbangan dana kampanye Pemiluakada 2012 kepada masyarakat. Minimal pada website masing-masing pasangan calon.
4. Menuntut KPU agar bekerja secara independen dan tegas dalam pelaksanaan proses Pemiluakada DKI Jakarta 2012.
5. Menuntut Panwaslu agar berani, tegas dan proaktif dalam menangani pelanggaran-pelanggaran khususnya korupsi politik pada Pemiluakada DKI Jakarta 2012 ini.
6. Merekomendasikan adanya kerjasama multipihak untuk mensukseskan Pemiluakada DKI Jakarta 2012 ini. Kerjasama tersebut antara KPU, Panwaslu, Komisi Informasi Pusat, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan PPATK.